



Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Ciamis Tahun 2024

Angga Nugraha

Universitas Galuh

R.Rindu Garvera

Universitas Galuh

Ii Sujai

Universitas Galuh

Alamat: Alamat: Jl. R. E. Martadinata No. 150 Ciamis

Korespondensi penulis: angga_nugraha00@student.unigal.ac.id

Abstract. *This study is motivated by observations revealing the suboptimal political participation of first-time voters in the 2024 regional head elections (Pilkada) in Ciamis Regency. The problems identified include: (1) low participation among first-time voters, (2) limited access to political information for young voters, and (3) insufficient outreach and socialization efforts from the General Election Commission (KPU) regarding the 2024 Pilkada in Ciamis. This research employs a descriptive qualitative method. Primary data were collected through interviews with seven informants. Data collection techniques included literature studies, field observations, interviews, and documentation. Data were analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that political participation among first-time voters remains limited when viewed through five influencing dimensions: modernization, changes in social class structures, the influence of intellectuals and modern mass communication, political elite conflicts, and extensive government involvement in social, economic, and cultural affairs. Key obstacles include limited digital literacy among young voters and their inability to distinguish credible information. Furthermore, many first-time voters lack understanding of candidates' visions and missions. Efforts to overcome these challenges include encouraging first-time voters to be more selective with social media information and implementing political communication strategies tailored to the media habits of younger generations.*

Keywords: *Political participation, First-time voters, Regional head elections*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi dari hasil observasi yang dilakukan dan menemukan suatu masalah yaitu belum optimalnya partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Ciamis tahun 2024. 1) Masih kurangnya partisipasi kalangan pemilih pemula. 2) Kurangnya informasi politik bagi pemilih pemula. 3) Kurangnya sosialisasi dari KPU terhadap pemilih pemula mengenai Pilkada 2024 di Kabupaten Ciamis. Desain penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data primer adalah 7 orang yang diwawancarai. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi, wawancara, dan dokumentasi). Teknik analisis/pengolahan data dalam penelitian yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik pemilih pemula belum optimal berdasarkan 5 (lima) dimensi yang mempengaruhi partisipasi politik, yaitu: Modernisasi, Perubahan-perubahan struktur kelas sosial, Pengaruh kaum intelektual dan Komunikasi massa modern, Konflik di antara kelompok-kelompok pemimpin politik, Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Adapun hambatan-hambatan di antaranya kurangnya literasi digital pemilih pemula dan pemilih pemula belum bisa membedakan kebenaran informasi. Hambatan lainnya kurangnya pemahaman pemilih pemula mengenai visi misi calon. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan di atas di antaranya yaitu pemilih pemula harus lebih selektif dalam memuat informasi yang ada di sosial media sehingga tidak dengan mudah menggiring opini yang belum jelas kebenarannya. Upaya lainnya terkait persepsi pemilih pemula terhadap pemilihan kepala daerah yaitu harus ada strategi komunikasi politik yang lebih mengadaptasi kebiasaan pemilih pemula dalam penerimaan informasi.

Kata Kunci : Partisipasi politik, Pemilih pemula, Pemilihan kepala daerah

LATAR BELAKANG

Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi yang dianggap paling ideal untuk negara modern, di mana kekuasaan berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan ditujukan bagi kepentingan rakyat. Artinya, seluruh bentuk kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan digunakan demi kesejahteraan rakyat. Seperti pendapat Budiardjo (2008), masyarakat memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah serta tujuan negara, karena kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran sebagai pelayan bagi kepentingan masyarakat. Dalam sistem demokrasi, pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah merupakan elemen penting yang mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi.

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) menjadi momen penting demokrasi dalam menentukan arah kebijakan kedepannya. Pilkada dikatakan sebagai salah satu sarana demokrasi dan wujud nyata kedaulatan rakyat yang bertujuan menghasilkan wakil rakyat dan pemimpin yang aspiratif, berkualitas, serta bertanggung jawab dalam upaya mensejahterakan rakyat.

Pilkada diatur dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2016. Undang-Undang ini mengatur bagaimana mekanisme pemilihan, syarat calon, serta penyelenggaraan untuk gubernur, bupati dan walikota. Dalam Undang-Undang ini juga mengatur pilkada serentak, dimana pemilihan kepala daerah di beberapa dilakukan pada waktu yang sama untuk efisiensi dan efektivitas. Dari tahun 2005, pelaksanaan Pilkada di berbagai daerah menghadapi berbagai hambatan dan menimbulkan konflik, baik vertikal maupun horizontal. Beberapa contoh konflik termasuk perubahan tujuan Pilkada menjadi ajang pengumpulan dana partai politik, kecurangan, money politic, biaya tinggi, rendahnya partisipasi pemilih, dan sengketa Pilkada.

Partisipasi politik merujuk pada keterlibatan aktif individu maupun kelompok dalam aktivitas politik. Bentuk partisipasi ini dapat berupa mengikuti pemilu, menghadiri pertemuan publik, menjadi anggota partai politik, atau bergabung dengan kelompok-kelompok strategis lainnya. Menurut Rahman (2007) menyatakan bahwa dasar utama dari demokrasi, khususnya partisipasi, adalah keyakinan bahwa setiap individu paling memahami apa yang terbaik bagi dirinya sendiri. Mengingat kebijakan politik yang diambil dan dijalankan oleh pemerintah berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.

Salah satu kelompok pemilih yang perlu mendapat perhatian khusus terkait tingkat partisipasi politiknya adalah pemilih pemula. Hal ini karena jumlah pemilih pemula di Indonesia tergolong tidak sedikit. Namun, di sisi lain, pemilih pemula masih sering dianggap memiliki kesadaran politik dan pemahaman terhadap pendidikan politik yang relatif rendah. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran dapat berdampak pada menurunnya partisipasi politik dalam pemilu (Arumsari et al., 2020).

Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilih pemula merupakan warga negara Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara genap berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah/pernah menikah dan memiliki hak memilih, tetapi sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan undang-undang pemilu. Pemilih pemula adalah mereka yang baru pertama kali memilih karena baru mencapai usia pemilih, yaitu 17 hingga 21 tahun.

KPU Kabupaten Ciamis melalui akun Instagram @kpukabupatenciamis memberikan informasi tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada tahun 2024. Total pemilih yang terdaftar mencapai 960.995 orang, terdiri dari 479.141 pemilih laki-laki dan 481.854 pemilih perempuan, menunjukkan distribusi gender yang hampir seimbang.

Tingkat partisipasi pemilih di Pilkada Ciamis 2024 tidak mencapai target. KPU Ciamis sebelumnya menargetkan partisipasi pemilih mencapai 85 persen, namun kenyataannya hanya di angka 70,9 persen. Dibanding dengan Pilkada 2018 lalu, angka partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 turun cukup signifikan. Pada tahun 2018, tingkat partisipasi mencapai 78 persen. Sedangkan untuk Pemilu atau Pileg dan Pilpres 2024, angka partisipasi bisa mencapai 80,2 persen (Sumber : www.detik.com, 2024)

Partisipasi pemilih pada pilkada di kabupaten Ciamis tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya , Partisipasi pemilih yang hanya mencapai 70,9% dalam Pilkada Ciamis 2024 menjadi sorotan utama dan mengindikasikan adanya tantangan dalam proses demokrasi lokal. Angka ini mencerminkan bahwa sebagian besar masyarakat Ciamis, sekitar 29,1%, memilih untuk tidak menggunakan hak pilih mereka, sebuah fenomena yang dapat dipicu oleh berbagai faktor kompleks. Rendahnya partisipasi ini bukan hanya sekadar angka statistik, melainkan juga membawa implikasi signifikan terhadap legitimasi pemimpin terpilih dan representasi kebijakan yang akan diambil.

KAJIAN TEORITIS

1. Pengertian Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan pada aktivitas warga negara yang bertujuan untuk memberikan pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan dalam ranah politik. Kegiatan ini dilakukan oleh individu sebagai warga negara biasa, bukan sebagai pejabat pemerintah atau politisi. Ciri utama dari partisipasi politik adalah sifatnya yang sukarela, tidak didorong oleh paksaan dari negara ataupun partai politik yang sedang berkuasa (Anggara, 2013).

Menurut Surbakti (1992 :140) yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah “keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya”.

Menurut Herbert McClosky (Budiarjo: 2008:367) Partisipasi politik adalah “kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum (*“The term political participation will refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rulers and, directly or indirectly, in the formation of public policy”*).

Lebih lanjut Budiarjo (2008: 367) menyatakan partisipasi politik adalah “kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif”.

Dari pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik mencakup segala kegiatan individu atau kelompok dalam menentukan atau mengambil kebijakan pemerintah, baik itu dalam pemilihan pemimpin maupun penentuan sikap terhadap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah untuk dilaksanakan, yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Partisipasi politik sangat terkait dengan kesadaran politik. Semakin seseorang menyadari bahwa dirinya diperintah, semakin mereka menuntut hak untuk bersuara dalam penyelenggaraan pemerintah.

2. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik

Bentuk partisipasi politik seseorang terlihat dari kegiatan-kegiatan politiknya. Bentuk partisipasi politik yang paling umum dikenal adalah pemungutan suara (*voting*), baik untuk memilih calon wakil rakyat maupun memilih kepala negara.

Aktivitas partisipasi politik memang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk yang berbeda. Salah satu ilmuwan politik, Samuel P. Huntington, mengemukakan bahwa partisipasi politik mencakup 1) Kegiatan pemilihan termasuk di dalamnya memberikan sumbangan untuk kampanye. 2) Bekerja dalam pemilihan seperti mencari dukungan bagi seorang calon, terlibat dalam kampanye, dan kegiatan terkait lainnya Arifin (2003:140).

Verba dan Nie (1978) dalam Morissan (2014) menjelaskan bahwa partisipasi politik dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk, antara lain 1) *Voting*, yakni melakukan pemungutan suara atau mengikuti kegiatan pemilu. 2) *Campaign Activity*, mencakup kegiatan seperti menjadi anggota atau petugas partai politik, serta memberikan donasi kepada partai politik atau kelompok politik. Ini juga bisa mencakup promosi calon kandidat melalui media sosial atau situs web. 3) *Contacting*, yakni menghubungi pemimpin politik atau pejabat publik untuk menyampaikan masalah-masalah publik, seperti masalah ekonomi, melalui media massa atau internet, termasuk mengirim pesan melalui email kepada pejabat publik. 4) *Cooperative*, yakni kegiatan komunitas yang berkaitan dengan isu atau masalah komunitas lokal.

Berdasarkan penjelasan beberapa diatas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik mencakup segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat terkait dengan politik. Ini tidak hanya terbatas pada menjadi calon pemimpin atau mengikuti pemilu, tetapi juga menyebarkan informasi politik dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Teori-teori ini dianggap relevan sebagai pedoman dalam penelitian tentang partisipasi politik pemilih pemula dalam kegiatan pemilihan kepala daerah.

3. Pemilih Pemula

Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilih pemula adalah warga negara Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara genap berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah/pernah menikah dan memiliki hak memilih, tetapi sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan undang-undang pemilu. Pemilih pemula adalah mereka yang baru pertama kali memilih karena baru mencapai usia memilih, yaitu 17 hingga 21 tahun. Pengetahuan mereka tentang pemilu tidak jauh

berbeda dengan kelompok lainnya, namun mereka memiliki antusiasme dan preferensi yang berbeda.

Pemilih pemula, yang terdiri dari pelajar atau mahasiswa dengan rentang usia 17-21 tahun, memiliki segmen yang unik. Perilaku pemilih pemula ditandai dengan antusiasme yang tinggi, relatif lebih rasional, haus akan perubahan, dan memiliki kadar pragmatisme yang rendah.

4. Pemilihan Kepala Daerah

Menurut Abdullah dalam Siregar (2021) Pemilihan Kepala Daerah secara langsung (Pilkada) menjadi sebuah perjalanan sejarah baru dalam dinamika kehidupan berbangsa di Indonesia.

Menurut Asshiddiqie dalam Tankasiang (2023:84) Pilkada langsung adalah mekanisme demokrasi untuk merekrut pemimpin di daerah, di mana rakyat secara keseluruhan memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon pemimpin yang bersaing dalam medan permainan dengan aturan yang sama.

Suharizal dalam Wirdasari (2015:25-26), mengemukakan pemilihan kepala daerah merupakan perjalanan politik panjang yang diwarnai tarik menarik antara kepentingan elit politik dan kehendak politik, kepentingan nasional dan internasional.

Berdasarkan definisi pemilihan kepala daerah oleh beberapa ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa pemilihan kepala daerah adalah proses pemilihan langsung oleh rakyat untuk memilih pemimpin yang akan mengelola urusan daerah. Oleh karena itu, hak dan kebebasan yang dimiliki oleh rakyat harus dimanfaatkan dengan baik agar dapat memilih pemimpin yang benar-benar berkualitas dalam memimpin daerah tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Moleong (2019) mendefinisikan metode deskriptif kualitatif sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang mencerminkan pendapat dan perilaku yang dapat diamati. Fokus utama dari pendekatan ini adalah pemahaman holistik terhadap latar belakang dan individu yang terlibat. Pendekatan ini tidak memisahkan individu atau organisasi menjadi variabel terpisah, tetapi memandangnya sebagai bagian integral dari suatu keseluruhan.

Lokasi Penelitian dilakukan di Kabupaten Ciamis yang dilaksanakan pada bulan mei 2025 s/d bulan juli 2025.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui lapangan atau daerah penelitian dan hasil wawancara mendalam dengan informan sebanyak 7 orang dan observasi langsung.

2. Data Sekunder

Data Sekunder menurut Sugiyono (2022) adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Sumber data sekunder diambil dari buku untuk melengkapi kajian serta jurnal yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku dan bahan-bahan kepustakaan yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti penulis”.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dilokasi penelitian dengan cara :

a. Observasi

Observasi merupakan cara memperoleh data dengan mengadakan pengamatan langsung ke objek penelitian, observasi dilakukan adalah partisipan artinya peneliti ikut serta dalam proses kerja yang sedang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung dengan sumber data yang dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi politik merupakan pada aktivitas warga negara yang bertujuan untuk memberikan pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan dalam ranah politik.

Kegiatan ini dilakukan oleh individu sebagai warga negara biasa, bukan sebagai pejabat pemerintah atau politisi. Ciri utama dari partisipasi politik adalah sifatnya yang sukarela, tidak didorong oleh paksaan dari negara ataupun partai politik yang sedang berkuasa

Adapun dalam mengukur penelitian mengenai Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Ciamis Tahun 2024, peneliti menggunakan teori menurut Myron Weiner, (1991) dalam Anggara, (2013:146) yang memformulasikan adanya 5 (lima) dimensi yang mempengaruhi partisipasi politik, yaitu : Modernisasi, Perubahan-perubahan struktur kelas sosial, Pengaruh kaum intelektual dan Komunikasi massa modern, Konflik di antara kelompok-kelompok pemimpin politik, Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan.

Kemudian dari dimensi diatas dijabarkan menjadi beberapa indikator sebagai berikut :

1. Tingkat Literasi Pemilih Pemula

Penggunaan media sosial oleh pemilih pemula bisa dikatakan pemilih pemula begitu sering menggunakannya, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali dengan beberapa platform yang terdapat di *smartphone*. Namun Penggunaan teknologi memang tidak lepas dari dampak positif maupun negatif yang akan dirasakan oleh pengguna tergantung seberapa selektif dalam memilih platform dan isi di dalamnya.

Hasil penelitian terkait literasi digital pemilih pemula, dapat disimpulkan bahwa tingkat literasi digital pada pemilih pemula di Kabupaten Ciamis tergolong rendah. Pemilih pemula memang sudah akrab dengan media sosial seperti Instagram, tiktok, dan youtube sebagai sumber informasi, namun masih terdapat permasalahan yang terjadi yaitu pemilih pemula belum mampu membedakan informasi yang valid dan hoaks, pemahaman terhadap informasi politik masih menjadi hambatan, terutama karena penyampaian yang kurang menarik dan banyaknya informasi tidak kredibel yang tersebar di media sosial.

Hal tersebut diperlukannya upaya dari pemilih pemula sebagai pengguna harus pandai memilih dan memilah informasi yang sekiranya sesuai dengan kebenaran dan hoax, sehingga pemilih pemula tidak mudah tergiring opini dengan apa yang dibaca atau apa yang dilihat, dan juga tidak melakukan tindakan untuk menyebarluaskan informasi yang belum valid kebenarannya. Selain itu upaya pentingnya peningkatan kemampuan

literasi digital kritis juga penting pada pemilih pemula agar dapat menjadi pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab.

2. Pemahaman Mengenai Kekuasaan Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah

Modernisasi membuat pemilih pemula jadi lebih mudah mendapatkan informasi, lebih pintar, dan lebih terbuka cara berpikirnya. Karena itu, pemilih pemula akan lebih mengerti pentingnya memilih kepala daerah yang benar, serta mulai paham bahwa kepala daerah punya kekuasaan yang besar untuk mengatur hal-hal penting dalam kehidupan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pemahaman pemilih pemula di Kabupaten Ciamis mengenai kekuasaan politik dalam pemilihan kepala daerah sudah mulai terbentuk meskipun masih bersifat umum dan sederhana. Para pemilih pemula memahami kekuasaan politik sebagai wewenang atau kekuasaan kepala daerah dalam mengatur wilayah, membuat kebijakan, menjalankan program pembangunan, dan mengelola anggaran. Pemilih pemula juga menyadari bahwa kualitas pemimpin daerah akan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan adanya kesadaran awal tentang pentingnya memilih pemimpin daerah yang memiliki kapasitas dan integritas.

3. Tingkat pendidikan pemilih pemula

Tingkat pendidikan pemilih pemula memiliki peran penting dalam menentukan sikap mereka saat pemilihan kepala daerah. Semakin tinggi pendidikan, biasanya semakin paham soal politik, proses pemilihan, dan bagaimana hasil pemilihan bisa memengaruhi kehidupan sehari-hari. Pemilih pemula yang berpendidikan cenderung berpikir lebih logis, lebih kritis dalam menilai calon, dan tidak gampang percaya begitu saja pada janji-janji politik yang tidak masuk akal. Pendidikan membantu pemilih membuat keputusan yang lebih bijak saat memilih pemimpin daerah.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa tingkat pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk partisipasi politik yang aktif dan berkualitas. Pemilih pemula dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih memahami proses politik, memiliki kemampuan menganalisis informasi secara kritis, dan lebih sadar akan pentingnya peran mereka dalam pemilu. Sebaliknya, pendidikan yang rendah berpotensi menimbulkan sikap cuek terhadap politik, mudah terpengaruh informasi yang menyesatkan, dan kurang peduli terhadap proses demokrasi. Para informan banyak

berpendapat bahwa pendidikan dapat memengaruhi cara seseorang memaknai hak pilihnya dan bagaimana ia mengambil keputusan politik secara bertanggung jawab.

4. Partisipasi Politik Pemilih Pemula

Partisipasi politik pemilih pemula sebagai indikator struktur sosial merupakan peran aktif generasi muda yang baru memperoleh hak suara dalam menentukan arah kepemimpinan selanjutnya. Keterlibatan pemilih pemula menjadikan kesadaran dan tanggung jawab mereka terhadap masa depan. Saat pemilih pemula mulai terlibat dalam seluruh proses pilkada dari mencari informasi calon kepala daerah, memahami visi misi, hingga hadir di tempat pemungutan suara itu menunjukkan bahwa adanya partisipasi dari pemilih pemula.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan kepala daerah merupakan bentuk keterlibatan aktif kelompok warga negara yang baru pertama kali memiliki hak memilih, umumnya berusia 17 hingga 21 tahun. Partisipasi dari pemilih pemula yaitu pemilih pemula menyatakan kehadiran secara langsung ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk menggunakan hak pilihnya. Selain itu, beberapa pemilih pemula tidak hanya terlibat dalam pemilihan secara langsung, tetapi juga mengambil peran dalam menyebarkan informasi politik kepada rekan-rekannya melalui media sosial, bahkan ada yang turut serta menjadi bagian dari penyelenggara Pilkada seperti KPPS.

5. pengaruh media sosial bagi partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan kepala daerah

Pengaruh media sosial bagi partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan kepala daerah sebagai indikator pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern, media sosial memang menjadi alat yang sangat efektif bagi kaum intelektual seperti akademisi, aktivis, dan tokoh muda untuk menyebarkan edukasi politik secara luas. Selain itu, media sosial sebagai bentuk komunikasi massa modern memungkinkan terjadinya interaksi dua arah, dengan pemilih pemula tidak hanya menerima informasi saja, akan tetapi juga terlibat aktif dengan berdiskusi, memberikan kritik, dan menyampaikan pendapat tentang calon kepala daerah.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa media sosial memiliki pengaruh yang signifikan dalam penyebaran informasi politik. Karena media sosial menjadi alat yang digunakan pemilih pemula untuk mencari serta menyebarkan berbagai informasi yang

ada. Media sosial juga dipandang sebagai media yang sangat efektif dalam menjangkau pemilih pemula karena kemudahan akses dan daya tarik kontennya. Pemilih pemula cenderung menggunakan media sosial sebagai sumber utama informasi, terutama jika informasi tersebut berasal dari individu atau figur yang mereka anggap kredibel, seperti kaum intelektual. Para informan menyatakan bahwa kehadiran tokoh intelektual yang bersikap netral dalam menyampaikan konten politik melalui media sosial dapat meningkatkan kepercayaan dan mendorong partisipasi politik yang lebih aktif. Meskipun demikian, pemilih pemula juga menyadari bahwa tidak semua informasi di media sosial memiliki kualitas dan kebenaran yang terjamin, sehingga penting untuk menumbuhkan kesadaran kritis dalam mengonsumsi konten digital.

6. persepsi pemilih pemula terhadap konflik politik

Pemahaman pemilih pemula mengenai konflik politik memiliki pengaruh terhadap pola berpikir serta keputusan yang diambil. Baik konflik yang berasal dari individu dalam partai politik maupun yang muncul di tengah masyarakat seperti fenomena yang terjadi belakangan ini, keduanya dapat memengaruhi tingkat partisipasi politik pemilih pemula secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa sebagian besar pemilih pemula mengetahui mengenai konflik politik yang terjadi yaitu mengenai fenomena kotak kosong. Persepsi terhadap konflik politik pada dasarnya bersifat subjektif dan sangat bergantung pada sejauh mana informasi diterima dan dipahami oleh individu. Salah satu isu yang menarik perhatian pemilih pemula adalah fenomena kotak kosong dalam pemilihan kepala daerah. Sebagian pemilih pemula mengaku mengetahui isu ini melalui media sosial atau percakapan di grup percakapan digital seperti whatsapp. Meskipun pemahaman pemilih pemula terhadap konflik politik belum sepenuhnya mendalam, perhatian terhadap isu seperti kotak kosong justru menjadi pintu masuk untuk meningkatkan minat pemilih pemula terhadap proses politik.

7. persepsi pemilih pemula terhadap visi misi calon kepala daerah

Tingkat persepsi pemilih pemula terhadap visi misi calon kepala daerah umumnya beragam. Pemilih pemula yang sudah paham pada visi misi calon dan relevan dengan apa yang diinginkan, maka hal tersebut akan mendorong pemilih pemula untuk ikut memilih.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa mayoritas pemilih pemula belum memahami secara jelas terkait visi dan misi calon kepala daerah. Tetapi hanya tahu nama calon kepala

daerahnya saja. Adapun hambatan yang dialami pemilih pemula yaitu beberapa informan menyatakan tidak tertarik untuk membaca atau mencari tahu lebih lanjut karena kontennya dianggap kurang menarik atau terlalu formal. Hambatan lainnya yang muncul yaitu rasa malas, kurangnya motivasi, dan rendahnya daya tarik penyampaian informasi dari calon kepada pemilih muda. Maka dari itu diperlukannya upaya yaitu komunikasi politik yang lebih mengadaptasi kebiasaan pemilih pemula dalam penerimaan informasi, dalam bentuk yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pemilih pemula. Seperti penyampaian informasi yang dikemas secara visual, menarik dan interaktif melalui media sosial akan lebih menarik perhatian dari pemilih pemula.

8. Keikutsertaan media sosial dalam membangun motivasi bagi pemilih pemula untuk ikut serta dalam pemilihan kepala daerah

Dengan semakin meluasnya peran pemerintah dalam aspek-aspek penting kehidupan. Media sosial pun berperan besar sebagai sarana penyebaran informasi dan program pemerintah secara cepat dan menarik bagi generasi muda. Ketika pemilih pemula menyadari bahwa hasil pilkada berdampak langsung pada kebijakan yang memengaruhi kehidupannya, maka keinginan untuk ikut memilih pun meningkat.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa media sosial kini menjadi sarana utama dalam menyebarkan informasi terkait pemilihan kepala daerah, khususnya untuk menjangkau pemilih pemula. Karena anak muda lebih banyak mengakses media sosial, selain itu juga media sosial dapat dimanfaatkan untuk kampanye dan edukasi terkait politik. Hal ini diperkuat oleh pernyataan yang menyebut bahwa media sosial sangat berperan dalam membangun motivasi pemilih pemula, terutama karena kontennya yang singkat, visual, dan mudah dipahami. Pemilih pemula merasa lebih cepat menerima informasi media sosial seperti instagram, tiktok dan lain-lain. Apalagi kalau konten yang menarik dan lucu dianggap lebih mudah dicerna dan mampu meningkatkan ketertarikan terhadap politik. Beberapa informan menyebut bahwa saat musim kampanye, informasi politik menjadi lebih ramai dan mudah ditemui di media sosial.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Ciamis Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik pemilih pemula belum berjalan optimal berdasarkan 5 (lima) dimensi yang mempengaruhi partisipasi politik, yaitu : Modernisasi, Perubahan-perubahan

struktur kelas sosial, Pengaruh kaum intelektual dan Komunikasi massa modern, Konflik di antara kelompok-kelompok pemimpin politik, Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan.

Adapun hambatan-hambatan yang ditemui adalah masih banyak dari pemilih pemula yang memang belum bisa menggunakan literasi digital dengan seefektif mungkin dan pemilih pemula pada saat ini masih belum bisa membedakan mana informasi yang benar dan mana informasi yang hoax. Hambatan lainnya terkait persepsi pemilih pemula terhadap visi misi calon kepala daerah karena pemilih pemula merasa tidak tertarik untuk membaca atau mencari tahu karena dianggap membosankan, terlalu formal, dan tidak disampaikan dalam format yang menarik bagi pemilih pemula

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan di atas yaitu pemilih pemula harus lebih selektif dalam memuat informasi yang ada di sosial media sehingga tidak dengan mudah menggiring opini yang belum jelas kebenarannya. Upaya lainnya terkait persepsi pemilih pemula terhadap pemilihan kepala daerah yaitu harus ada strategi komunikasi politik yang lebih mengadaptasi kebiasaan pemilih pemula dalam penerimaan informasi, dalam bentuk yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pemilih pemula seperti konten yang menarik tetapi tetap fokus pada informasi yang ingin disampaikan. Sehingga pemilih pemula akan lebih mudah menerima informasi tersebut

DAFTAR REFERENSI

- A. Rahman. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Anggara, S. (2013). *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Arumsari, N., Septina, W. E., & Saputro, I. H. (2020). Peran Media Sosial Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS dan PKN*, 5(1), 12-16.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hermansyah, D. Partisipasi Pemilih di Pilkada Ciamis 2024 Hanya 70,9%. *Diakses dari* <https://www.detik.com/jabar/pilkada/d-7666862/partisipasi-pemilih-di-pilkada-ciamis-2024-hanya-70-9>
- Siregar, W. A. S. (2021). *"Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Sugiyono. (2022) *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif*. Bandung: ALFABETA
- Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Wirdasari. 2015. *Proses Rekrutmen Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Periode 2015-2020 pada DPC PDIP Kota Bandar Lampung*. Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Lampung